

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1957.

_____, "Pengantar dalam Hukum Indonesia", dalam *Makalah Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta, 1957

Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Lingkungan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, cetakan ke lima, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.



M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Marjanne Thermorsuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Bogor, 2009.

Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Bandar Lampung, 2012.

Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsito, Bandung, 1992.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010.

Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Mataram, 2002.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah*. Dalam: *Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya, 1995.



Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, third edition, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., 1978.

B. Peraturan Perundang-undangan

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- (6) Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan,
- (8) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
- (9) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010 jo PP No. 61 Tahun 2012 jo PP No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2016 Tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga

- (11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

C. Internet

- <https://www.pengadaan.web.id/2016/01/pengertian-detail-engineering-design-ded-dalam-pekerjaan-konstruksi.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, diakses pada hari rabu, tanggal 20 februari, jam 11:36
- <http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html>, diakses pada tanggal 18 maret 2019, jam 08.31 WIB.
- <https://hariansinggalang.co.id/jalan-alahan-panjang-bayang-terkendala-status-hutan/>, diakses pada 10 Juli 2019, jam 14.00 WIB
- <http://amjununo.blogspot.com/2013/07/perencanaan-dan-pembangunan-jalan-raja.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2019
- http://lpp.dephut.go.id/wz_upload/file_izin/1.%20DETAIL%20LAMA%20WAKTU%20Persetujuan%20Prinsip-PPKH.pdf, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019
- <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/748/jbptunikompp-gdl-rahmatikap-37391-9-10uniko-i.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019
- <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/kecamatan-bayang-dan-bayang-utara-menjadi-sentra-sayur-pessel->, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bayang_Utara,_Pesisir_Selatan#Referensi, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019
- https://id.wikipedia.org/wiki/Alahan_Panjang,_Lembah_Gumanti,_Solok diakses pada tanggal 2 oktober 2019
- <https://padangkita.com/jalan-bayang-alahan-panjang-tuntas-2021/>,diakses pada tanggal 16 Februari 2020